

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH XII

RENCANA KERJA 2023



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAL JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH XII**

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN
DAN TATA LINGKUNGAN**

Nomor: SK.50/BPKHTL XII-1/12/2022

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH XII**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN
DAN TATA LINGKUNGAN,**

- Menimbang : a. bahwa telah diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor : SK.21/PKTL/SET.2/KEU.0/12/2022 Tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2023;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut dari Rencana Kerja (Renja) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sebagaimana disebut pada huruf a, dipandang perlu untuk menyusun dan menetapkan Rencana Kerja (Renja) Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XII Tahun 2023 sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

/5. Undang-Undang...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 80);
7. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tanggal 29 November 2012 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P. 41/MENLHK/SETJEN/ROKUM.1/10/2017 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.51/MENLHK-SETJEN/ROKUM.1/10/2017 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan;
14. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.1173/MENLHK/SETJEN/REN.0/11/2022 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
15. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor : P.3/PKTL/SET.2/OTL.0/1/2021 tentang Pelaksanaan Fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan Bidang Tata Lingkungan;
16. Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII Tanjungpinang Nomor : SK.35/BPKH XII-1/11/2020 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII Tanjungpinang Tahun 2020-2024 Tanggal 4 November 2020.

/MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH XII TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023 BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH XII
- KESATU : Rencana Kerja (Renja) Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XII Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Kerja (Renja) Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XII Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada butir Kesatu merupakan pedoman dan acuan dalam :
1. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XII Tahun 2023.
 2. Bahan evaluasi tahunan Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XII, yang akan disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj).

Ditetapkan di : Tanjungpinang
Pada tanggal : 19 Desember 2022

KEPALA BALAI,
Budi Setiawan
BUDI SETIAWAN
NIP. 19790723 200312 1 003



Lampiran : Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan
Wilayah XII
Nomor : SK. 50 /BPKHTL XII-1/12/2022
Tanggal : 19 Desember 2022

**TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH XII**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XII Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun ke-4 dari Rencana Strategis Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024 dan sekaligus merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2023 yang memuat garis besar/gambaran target kinerja dan anggaran Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XII selama satu tahun. Rencana Kerja disusun sebagai dasar dalam penyusunan alokasi anggaran, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi kinerja pada tahun sebelumnya.

Dengan hasil capaian kinerja tahun sebelumnya dan dukungan anggaran yang telah diberikan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII optimis dapat menyelesaikan target kinerja tahun 2023. Pada tahun 2023 Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XII akan melaksanakan 4 (empat) kegiatan yaitu pencegahan dampak lingkungan; pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan; dan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Indikator kinerja dari 4 (empat) kegiatan meliputi (1) terlaksananya kebijakan bidang lingkungan hidup; (2) terlaksananya penataan batas kawasan hutan dalam rangka penetapan kawasan hutan, (3) terlaksananya layanan data dan informasi SDH serta layanan data dan informasi penutupan lahan nasional, dan (4) Nilai SAKIP Ditjen PKTL; Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL dan Laporan keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel.

Akhir kata, semoga Rencana Kerja ini dapat dipedomani sebagai dasar dalam penyusunan anggaran serta evaluasi pelaksanaan kegiatan Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XII Tahun 2023.

Tanjungpinang, Desember 2022

Kepala Balai,



Budi Setiawan, SP, M.Si
NIP. 19790723 200312 1 003

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XII	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN.....	v
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Kududukan, Tugas dan Fungsi.....	1
C. Struktur Organisasi.....	2
C. Profil Sumber Daya Manusia.....	5
II. CAPAIAN KINERJA	
A.1 Capain Kinerja Tahun 2021.....	6
A.2 Capain Kinerja Tahun 2022.....	10
B.1 Capain Anggaran Tahun 2021.....	15
B.2 Capain Anggaran Tahun 2022.....	17
III. RENCANA KERJA TAHUN 2023	
A. Strategi Mendukung Program KLHK dan Program Prioritas Nasional.....	21
B. Sasaran Kegiatan Tahun 2023.....	22
IV. PENUTUP.....	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar.1 Struktur Organisasi BPKHTL Wilayah XII	4
---	---

DAFTAR TABEL

Tabel.1 Sebaran Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Golongan	5
Tabel.2 Capaian Kinerja BPKH Wilayah XII Tahun 2021	6
Tabel.3 Capaian Kinerja BPKHTL Wilayah XII Tahun 2022.....	11
Tabel.4 Realisasi Anggaran BPKH Wilayah XII Tahun 2021.....	16
Tabel.5 Realisasi Anggaran BPKHTL Wilayah XII Tahun 2022.....	19
Tabel.6 Target Kinerja BPKHTL Wilayah XII Tahun 2023.....	22

DAFTAR LAMPIRAN

Matriks Rencana Kerja (Renja) Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XII Tahun 2023.....	27
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) Wilayah XII Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) BPKHTL Wilayah XII tahun 2020-2024 sekaligus penjabaran dari Renja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Ditjen PKTL) Tahun 2023. Renja BPKHTL Wilayah XII Tahun 2023 memuat gambaran target kinerja dan anggaran BPKHTL Wilayah XII selama tahun 2023. Sejalan dengan hal tersebut, kegiatan yang disusun dalam Renja BPKHTL Wilayah XII Tahun 2023 mengacu kepada tugas dan fungsi BPKHTL sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Hutan dan Tata Lingkungan.

Renja BPKHTL Wilayah XII Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai dokumen perencanaan untuk penetapan anggaran dan kegiatan tahun 2023. Adapun tujuan dari penyusunan Renja adalah memberikan acuan dalam merencanakan kegiatan yang terarah, efektif dan terukur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta memberikan gambaran umum kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BPKHTL Wilayah XII Tahun 2023 dalam mendukung pencapaian program, sasaran dan kebijakan strategis Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

BPKHTL wilayah XII adalah instansi pemerintah yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang berkedudukan di Tanjungpinang dengan wilayah kerja Provinsi Kepulauan Riau. Tugas BPKHTL Wilayah XII sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2022 melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi serta perubahan status/peruntukan kawasan hutan, verifikasi data dan informasi kajian dampak lingkungan dan pengelolaan data dan informasi sumberdaya hutan dan lingkungan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, BPKHTL Wilayah XII menyelenggarakan fungsi, antara lain : (a) pelaksanaan penataan batas, rekonstruksi batas dan pemetaan kawasan hutan; (b) pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan; (c) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian penggunaan kawasan hutan; (d) penilaian teknis tata batas penataan batas areal kerja perizinan berusaha pemanfaatan hutan, persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, persetujuan penggunaan kawasan hutan, persetujuan pelepasan kawasan hutan dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan tertentu; (e) pelaksanaan inventarisasi hutan skala nasional di wilayah; (f) pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi sumber daya hutan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan; (g) penyebarluasan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan; (h) penyiapan dan penyajian data dan informasi perencanaan kehutanan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan serta tata lingkungan; (i) pelaksanaan verifikasi data dan informasi ekoregion, jasa lingkungan hidup tinggi, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; (j) fasilitasi penyiapan penerapan instrument ekonomi lingkungan hidup serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; (k) pelaksanaan pendampingan dan verifikasi informasi geospasial dalam uji kelayakan lingkungan hidup daerah; (l) pelaksanaan forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dan penyuluhan kepada tim uji kelayakan lingkungan hidup daerah; (m) pelaksanaan diseminasi sistem kajian dampak lingkungan, ekoregion, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan instrument ekonomi lingkungan hidup di daerah dan; (n) pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan dan hubungan masyarakat advokasi hukum dan pengelolaan data dan informasi.

C. Struktur Organisasi

BPKHTL Wilayah XII berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dan dipimpin oleh Kepala Balai. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPKHTL Wilayah XII memiliki 3 (tiga) Eselon IV dan kelompok jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH), yaitu:

1. Sub Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas :

- melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan;
 - urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat;
 - advokasi hukum; dan
- pengelolaan data dan informasi

2. Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan

Mempunyai tugas :

- melaksanakan penyiapan bahan penataan batas; rekonstruksi batas dan pemetaan kawasan hutan;
- inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan;
- penilaian teknis tata batas penataan batas areal kerja perizinan berusaha pemanfaatan hutan, persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, persetujuan penggunaan kawasan hutan, persetujuan pelepasan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan tertentu

3. Seksi Sumberdaya Hutan dan Tata Lingkungan

Mempunyai tugas

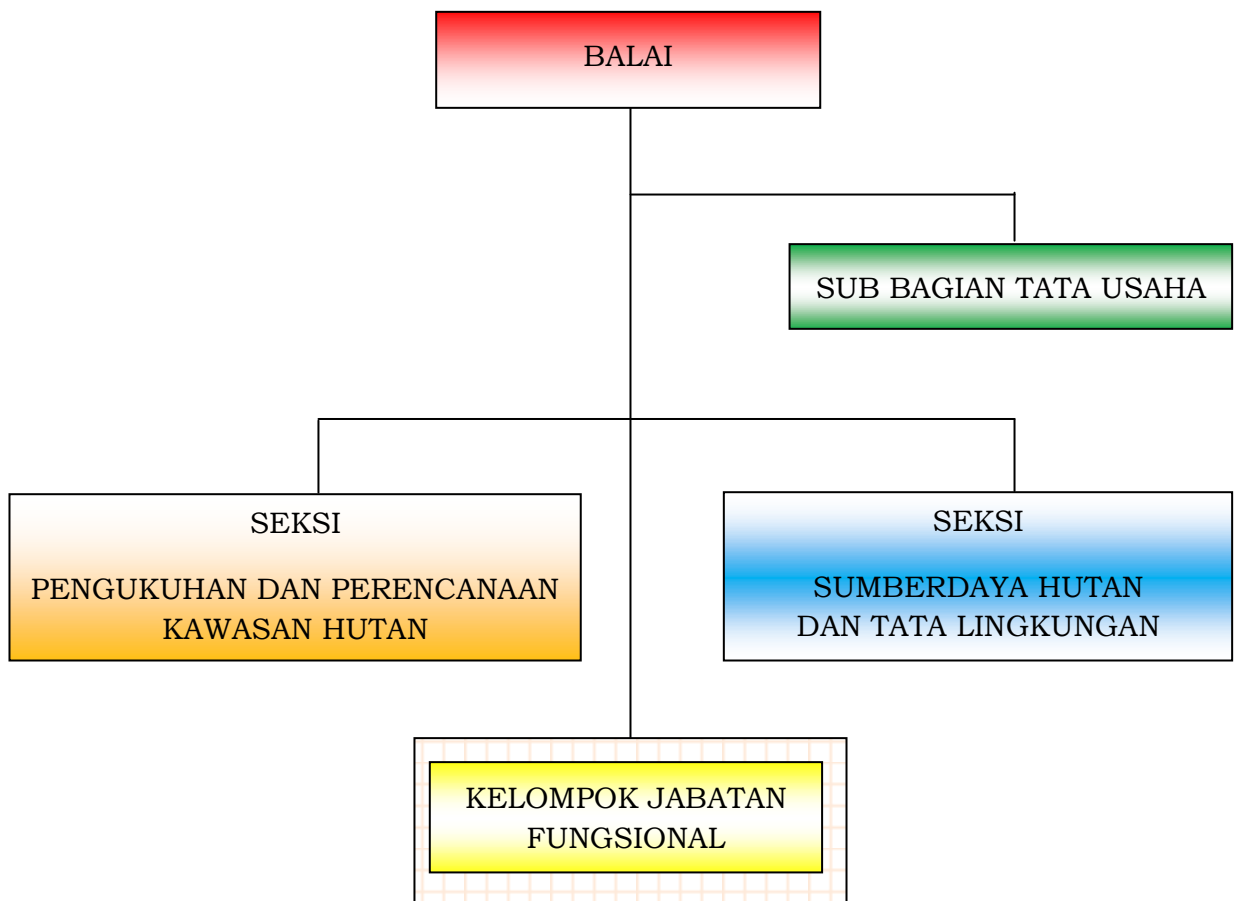
- melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan penilaian penggunaan kawasan hutan;
- inventarisasi hutan skala nasional di wilayah;
- pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi sumber daya hutan, sumber daya alam dan lingkungan hidup di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan;
- penyebarluasan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan;
- penyiapan dan penyajian data dan informasi perencanaan kehutanan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan serta tata lingkungan;
- verifikasi data dan informasi ekoregion, jasa lingkungan hidup tinggi, dan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- fasilitasi penyiapan penerapan instrument ekonomi lingkungan hidup, dana daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- pendampingan dan verifikasi informasi geospasial dalam uji kelayakan lingkungan hidup daerah; dan

- forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dan penyuluhan kepada tim uji kelayakan lingkungan hidup daerah, tim validasi kajian lingkungan hidup strategis daerah; serta
- tim verifikasi rencana perindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah; dan diseminasi sistem kajian dampak lingkungan, ekoregion, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan instrument ekonomi lingkungan hidup di daerah

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPKHTL sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan

Selanjutnya fungsi-fungsi tersebut terstruktur dalam tata hubungan kerja sebagaimana Struktur Organisasi Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XII sebagaimana pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi BPKHTL Wilayah XII

D. Profil Sumber Daya Manusia

BPKHTL Wilayah XII memiliki personil sejumlah 49 orang yang terdiri dari 26 PNS; 8 CPNS dan 15 PPNPN. Berdasarkan jumlah keseluruhan pegawai terdapat 31 orang pegawai laki-laki dan sisanya merupakan pegawai perempuan sebanyak 18 orang. Berdasarkan jabatan sebagian besar pegawai di BPKHTL Wilayah XII didominasi oleh jabatan fungsional PEH sebanyak 19 orang, fungsional umum 9 orang, surveyor pemetaan sebanyak 4 orang dan 2 orang pejabat struktural. Sebanyak 49 pegawai yang berada di BPKHTL Wilayah XII ditempatkan sesuai kebutuhan pada Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan dan Seksi Sumber Daya Hutan dan Tata Lingkungan. Untuk melihat lebih rinci sebaran pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan pada masing-masing seksi dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah ini.

Tabel. 1 Sebaran Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Golongan

No.	Bagian/Seksi	Tingkat Pendidikan					Jumlah	Tingkat Golongan			Jumlah
		S3	S2	S1	D3	SLTA /SMK		IV	III	II	
1.	Tata Usaha										
	ASN	-	2	1	3	-	6	1	4	1	6
	PPNPN	-	-	2	3	5	10	-	-	-	-
2.	Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan										
	ASN	-	-	3	5	5	13	-	7	6	13
	PPNPN	-	-	1	-	2	3	-	-	-	-
3.	Sumber Daya Hutan dan Tata Lingkungan										
	ASN	-	3	4	7	1	15	1	10	4	15
	PPNPN	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-
	Jumlah	-	5	12	18	14	49	2	21	11	34

Sumber : Laporan Kepegawaian BPKHTL Wilayah XII Tahun 2022

BAB II

CAPAIAN KINERJA

A. Capaian Kinerja

A.1. Capaian Kinerja Tahun 2021

Tahun 2021 BPKH Wilayah XII melaksanakan beberapa kegiatan dengan *outcomes* yang diharapkan pada akhir Tahun 2021 adalah :

1. terbitnya 1 rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan penataan batas kawasan hutan;
2. terbitnya 1 rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan penataan batas kawasan hutan [PEN];
3. terbitnya 1 rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan inventarisasi, verifikasi dan BATB objek TORA dalam kawasan hutan;
4. tersedia data dan informasi sumberdaya hutan yang *valid* dan *up to date* di wilayah kerja BPKH sebanyak 4 Klaster Enumerasi TSP/PSP;
5. tersedia data dan informasi pemantauan sumber daya hutan untuk update data penutupan lahan tingkat nasional pada 1 Provinsi;
6. tersedia data hasil verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan sebanyak 1 Badan Usaha; dan
7. tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BPKH Wilayah XII sesuai dengan kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal, nilai SAKIP adalah 80 poin

Capaian kinerja masing-masing kegiatan dalam mencapai sasaran kegiatan sesuai dengan Renja BPKH Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel.2 Capaian Kinerja BPKH Wilayah XII Tahun 2021

No.	Kegiatan/Rincian Output (RO)	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1.	K1. Penguatan dan Penatagunaan Kawasan Hutan IK1. - Panjang batas kawasan hutan yang telah diselesaikan hak-hak pihak ketiga - Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan				
	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan	Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan penataan batas kawasan hutan yang diterbitkan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100,00

No.	Kegiatan/Rincian Output (RO)	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan (PEN)	Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan penataan batas kawasan hutan yang diterbitkan (PEN)	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100,00
	Inventarisasi, Verifikasi dan BATB Objek TORA dalam kawasan hutan (PEN)	Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan inventarisasi, verifikasi dan penataan batas objek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKH diterbitkan (PEN)	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100,00
2.	K3. Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan IK3. - Data dan informasi Sumber Daya Hutan hasil inventarisasi Hutan Nasional di wilayah kerja BPKH - Data dan informasi pemantauan SDH di wilayah kerja BPKH				
	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKH	Penyediaan data dan informasi sumber daya hutan dan kawasan hutan terlayani dan diperbarui	4 Layanan	4 Layanan	100,00
	Data dan informasi pemantauan SDH di wilayah kerja BPKH	Penyediaan data dan informasi pemantauan SDH di wilayah kerja BPKH terlayani	1 Layanan	1 Layanan	100,00
3.	K2. Perencanaan Kawasan Hutan IK2. Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH				
	Hasil verifikasi PNBP penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	Pelaksanaan verifikasi PNBP penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKH terlaksana	1 Badan Usaha	1 Badan Usaha	100,00
4.	K1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan IK1. - Nilai SAKIP Ditjen PKTL - Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL - Laporan Keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel				
	Layanan Perkantoran	Layanan perkantoran terlaksana	1 Layanan	1 Layanan	100,00
	Layanan Umum	Layanan dukungan manajemen satker terlaksana	1 Layanan	1 Layanan	100,00
	Layanan Sarana Internal	Layanan sarana internal terlaksana	10 Unit	10 Unit	100,00

Sumber : Laporan Kinerja (LKj) BPKHTL Wilayah XII Tahun 2021

Capaian kinerja pada 4 (empat) kegiatan pokok yang dilaksanakan BPKH Wilayah XII pada tahun 2021 tercapai 100% dengan rincian sebagai berikut :

1. Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan

Rincian Output panjang batas kawasan hutan yang telah diselesaikan merupakan salah satu kegiatan yang direvisi panjang batasnya dari semula 100 Km menjadi 285 Km. Pada RO ini komponen kegiatan yang dilaksanakan yaitu pengukuran dan pemasangan tanda batas definitif kawasan hutan (reguler) sepanjang 285 Km di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dengan

capaian kinerja yaitu terbitnya 1 rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan penataan batas kawasan hutan.

2. Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan (PEN)

Masih merupakan komponen pengukuran dan pemasangan tanda batas definitif kawasan hutan (reguler) sepanjang 285 Km di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dan termasuk dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan capaian kinerja terbitnya 1 rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan penataan batas kawasan hutan.

3. Dokumen Hasil Inventarisasi, Verifikasi dan BATB Obyek TORA dalam kawasan hutan

Rincian Output inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan adalah target tambahan yang bersumber dari ABT PNBPKH berupa penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian objek TORA sepanjang 208 Km dan merupakan program Pemulihan Ekonomi Nasional [PEN]. Namun sampai dengan bulan September 2021 Surat Keputusan Pelepasan HPK Tidak Produktif untuk penyelesaian objek TORA sepanjang 208 Km di Kabupaten Lingga dan Kabupaten Natuna belum disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga kegiatan belum dapat dilaksanakan. Pada akhir bulan Oktober 2021, terbit SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.989/MENLHK/SETJEN/PLA.2/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Tidak Produktif Sumber Obyek Tanah Reforma Agraria Untuk pemanfaatan Kebun Rakyat, Pertanian Tanaman Pangan dan Pengembangan Wilayah Terpadu Atas Nama Bupati Natuna di Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau seluas ± 275 Ha. Dengan terbitnya SK tersebut artinya penataan batas definitif kawasan hutan untuk penyelesaian TORA hanya dapat dilakukan sepanjang ± 44 Km dari target 208 Km.

Pertimbangan kondisi cuaca (musim angin) di Kabupaten Natuna pada bulan November sampai dengan Desember 2021 tidak memungkinkan untuk dilalui kapal laut menuju lokasi Pulau Subi dan Pulau Serasan maka penataan batas

definitif kawasan hutan untuk penyelesaian TORA di Kabupaten Natuna hanya dapat dilaksanakan sepanjang \pm 10 Km di Pulau Bunguran. Terhadap sisa anggaran dari kegiatan tersebut dialihkan menjadi kegiatan pemancangan batas sementara dan identifikasi hak-hak pihak ketiga kawasan hutan (reguler) sepanjang \pm 446 Km di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dan masih merupakan program PEN. Namun dengan demikian capaian kinerja pada kegiatan ini tercapai yaitu terbitnya 1 rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan inventarisasi, verifikasi dan penataan batas objek TORA dalam kawasan hutan [PEN].

4. Data dan informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional
Output dari kegiatan ini adalah penyediaan data dan informasi sumber daya hutan yang terbarukan. Kegiatan dilaksanakan melalui enumerasi TSP/PSP sebanyak 4 Klaster di Kabupaten Lingga.
5. Data dan informasi pemantauan sumber daya hutan
Kegiatan ini dilaksanakan melalui penafsiran citra satelit resolusi sedang di Provinsi Kepulauan Riau untuk update data penutupan lahan tingkat nasional. Adapun komponen dari kegiatan ini mencakup pengecekan lapangan hasil penafsiran citra satelit resolusi sedang. Data dan informasi pemantauan sumber daya hutan memiliki capaian kinerja 1 layanan.
6. Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan
Sebanyak 1 Badan Usaha telah dilakukan verifikasi pembayaran PNPB Penggunaan Kawasan Hutan an. PT Mitra Persada Resources di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau.
7. Layanan perkantoran
Layanan perkantoran yang terdiri dari pembayaran gaji dan tunjangan , operasional dan pemeliharaan kantor tercapai 1 layanan.
8. Layanan dukungan manajemen satker
Pada kegiatan ini terdiri dari penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan pemantuan dan evaluasi, pengelolaan keuangan dan perbendaharaan, pengelolaan kepegawaian dan pelayanan umum, rumah

tangga dan perlengkapan dimana elemen kegiatan ini untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PKTL sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal dengan capaian kinerja 1 layanan.

9. Layanan sarana internal

Komponen kegiatan ini mencakup pengadaan peralatan perangkat pengolahan data dan komunikasi berupa printer, smart TV dan audio system sebanyak 5 unit dan pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran berupa AC sebanyak 5 unit. Dengan demikian layanan sarana internal tercapai 10 unit.

A.2. Capaian Kinerja Tahun 2022

Tahun ketiga dalam pelaksanaan Renstra 2020-2024 terdapat beberapa perubahan dan penyesuaian target kinerja lingkup Ditjen PKTL. Adanya penambahan program kualitas lingkungan hidup dan penambahan anggaran mengubah target kinerja yang telah ditetapkan BPKH Wilayah XII Tahun 2022. Sejalan dengan hal tersebut terbit Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan sehingga nomenklatur BPKH berubah menjadi BPKHTL. Dimana pada tahun 2022 juga BPKHTL mengemban tugas untuk melaksanakan kegiatan pencegahan dampak lingkungan. Dengan demikian diharapkan capaian kinerja pada akhir tahun 2022 antara lain : 1) terlaksananya kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL sebanyak 1 layanan; (2) terlaksananya kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKHTL sebanyak 1 layanan; (3) terbitnya 1 rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan penataan batas kawasan hutan; (4) tersedia data dan informasi sumberdaya hutan yang *valid* dan *up to date* sebanyak 5 Klaster Enumerasi TSP/PSP; (5) tersedia data dan informasi pemantauan sumber daya hutan untuk update data penutupan lahan tingkat nasional pada 1 Provinsi; (6) tersedia data hasil verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan sebanyak 1 Badan Usaha; dan (7) tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BPKHTL Wilayah XII sesuai dengan kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal; serta (8) terlaksananya layanan sarana dan prasarana internal

sebanyak 6 unit. Berikut capaian kinerja BPKHTL Wilayah XII Tahun 2022 sebagaimana tersaji pada Tabel 3.

Tabel.3 Capaian Kinerja BPKHTL Wilayah XII Tahun 2022

No.	Kegiatan/Rincian Output (RO)	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1.	K1. Pencegahan Dampak Lingkungan				
	IK1. Terlaksananya Layanan Kajian Tata Lingkungan di wilayah kerja BPKHTL				
	Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah kerja BPKHTL	Terlaksananya Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah kerja BPKHTL	1 Layanan	1 Layanan	100,00
	Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah kerja BPKHTL	Terlaksananya Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah kerja BPKHTL	1 Layanan	1 Layanan	100,00
2.	K2. Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan				
	IK2. Panjang batas kawasan hutan yang telah diselesaikan hak-hak pihak ketiga				
	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan	Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan penataan batas kawasan hutan yang diterbitkan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100,00
3.	K3. Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan				
	IK3. - Data dan informasi Sumber Daya Hutan hasil inventarisasi Hutan Nasional di wilayah kerja BPKHTL - Data dan informasi pemantauan SDH di wilayah kerja BPKHTL				
	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKH	Penyediaan data dan informasi sumber daya hutan dan kawasan hutan terlayani dan diperbarui	5 Layanan	5 Layanan	100,00
	Data dan informasi pemantauan SDH di wilayah kerja BPKH	Penyediaan data dan informasi pemantauan SDH di wilayah kerja BPKH terlayani	1 Layanan	1 Layanan	100,00
4.	K2. Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan				
	IK2. Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL				
	Hasil verifikasi PNPB penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	Pelaksanaan verifikasi PNPB penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKH terlaksana	1 Badan Usaha	1 Badan Usaha	100,00
5.	K1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan				
	IK1. - Nilai SAKIP Ditjen PKTL - Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL - Laporan Keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel				
	Layanan Umum	Layanan umum terlaksana	1 Layanan	1 Layanan	100,00
	Layanan Perkantoran	Layanan perkantoran terlaksana	1 Layanan	1 Layanan	100,00
	Layanan Sarana Internal	Layanan sarana internal terlaksana	6 Unit	6 Unit	100,00

Sumber : Laporan Kinerja (LKj) BPKHTL Wilayah XII Tahun 2022

1. Indikator Kinerja Terlaksananya Layanan Kajian Tata Lingkungan di Wilayah Kerja BPKHTL

Dalam rangka mencapai sasaran program kualitas lingkungan hidup, Ditjen PKTL memberikan mandat kepada BPKHTL untuk melaksanakan kegiatan pencegahan dampak lingkungan. Kegiatan ini sejalan dengan Peraturan Dirjen PKTL Nomor : P.3/PKTL/SET.2/OTL/1/2021 tentang Pelaksanaan Fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan Bidang Tata Lingkungan. Tahun 2022 BPKHTL Wilayah XII melaksanakan kegiatan pencegahan dampak lingkungan dengan 2 (dua) Rincian Output yaitu :

- (1) Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL

Dalam pelaksanaannya sesuai dengan anggaran yang tersedia, kegiatan ini dikemas dalam bentuk Diseminasi Penyelenggaraan Tata Lingkungan di Daerah dengan melibatkan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi/Kota/Kabupaten di Kepulauan Riau. Capaian kinerja dengan output terlaksananya fasilitasi kegiatan pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL Wilayah XII tercapai sebanyak 1 layanan.

Dalam melaksanakan fungsinya di bidang tata lingkungan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2022 untuk mendukung Tusi Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor [Dit. PDLKWS], peran BPKHTL Wilayah XII antara lain : (1) pelaksanaan verifikasi data dan informasi ekoregion, jasa lingkungan hidup tinggi, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; (2) fasilitasi penyiapan penerapan instrument ekonomi lingkungan hidup serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; (3) pelaksanaan forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dan penyuluhan kepada tim uji kelayakan lingkungan hidup daerah; (4) pelaksanaan diseminasi sistem kajian dampak lingkungan, ekoregion, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan instrument ekonomi lingkungan hidup di daerah.

(2) Layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKHTL

Kegiatan dengan output terlaksananya fasilitasi kajian dampak lingkungan bidang usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKHTL Wilayah XII sebanyak 1 layanan. Pelaksanaan kegiatan dalam bentuk Sosialisasi Penapisan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan. Dalam sosialisasi tersebut juga disampaikan konsep peran BPKHTL terhadap sistem kajian dampak lingkungan sehingga Capaian kinerja pada kegiatan ini tercapai sebanyak 1 layanan.

Dalam melaksanakan fungsinya dalam bidang tata lingkungan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2022 untuk mendukung Tusi Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan [Dit. PDLUK], peran BPKHTL Wilayah XII yaitu (1) Penyiapan, penelaahan data dan informasi perencanaan, kehutanan, pengukuhan kawasan hutan, pemanfaatan hutan serta tata lingkungan; (2) pelaksanaan pendampingan dan verifikasi informasi geospasial dalam uji kelayakan lingkungan hidup daerah.

2. Panjang batas kawasan hutan yang telah diselesaikan

Merupakan target tambahan yang bersumber dari Anggaran Belanja Tambahan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan (ABT PNB-PKH) berupa kegiatan pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan dengan target 1 Rekomendasi Kebijakan. Kegiatan pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan dengan Rincian Output panjang batas kawasan hutan yang telah diselesaikan terdiri dari beberapa komponen antara lain : (1) pengukuran dan pemasangan tanda batas definitif kawasan hutan di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau sepanjang ± 688 Km; (2) pembuatan trayek batas kawasan hutan, 2 kabupaten; (3) pengukuran dan pemasangan tanda batas definitif kawasan hutan pulau terluar di Kabupaten Bintan (Pulau Sentut) sepanjang 0,62 Km; dan (4) pengukuran dan pemasangan tanda batas definitif kawasan hutan pulau terluar di Kabupaten Natuna (Pulau Kepala dan Pulau Semiun) sepanjang 5,14 Km. Capaian kinerja pada kegiatan ini sesua

target yang telah ditetapkan yaitu terbitnya 1 rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan penataan batas kawasan hutan.

3. Data dan informasi Sumber Daya Hutan

Output dari kegiatan ini adalah penyediaan data dan peta informasi sumber daya hutan yang terbaru terlayani. Kegiatan yang dilaksanakan melalui inventarisasi sumber daya hutan enumerasi TSP/PSP terealisasi sebanyak 5 Klaster dengan rincian 2 di Kabupaten Lingga dan 3 di Kabupaten Natuna. Realisasi kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan yaitu 5 layanan sehingga capaian kinerja adalah sebesar 100%.

4. Data dan informasi pemantauan sumber daya hutan

Kegiatan ini dilaksanakan melalui penafsiran citra satelit resolusi sedang di Provinsi Kepulauan Riau untuk update data penutupan lahan tingkat nasional. Adapun komponen dari kegiatan ini mencakup pengecekan lapangan hasil penafsiran citra satelit resolusi sedang yang dilaksanakan di Kabupaten Karimun. Data dan informasi pemantauan sumber daya hutan yang terbaru memiliki target kinerja sebanyak 1 Provinsi. Capaian kinerja pada kegiatan ini yaitu 1 layanan.

5. Hasil Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan

Kegiatan verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan memiliki capaian kinerja 100%. Sebanyak 1 Badan Usaha telah dilakukan verifikasi pembayaran PNBK Penggunaan Kawasan Hutan an. PT. Karimun Granite di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau.

6. Layanan umum

Layanan umum merupakan bagian dari layanan dukungan manajemen internal yang terdiri dari penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan pemantuan dan evaluasi, pengelolaan keuangan dan perbendaharaan, pengelolaan kepegawaian dan pelayanan umum, rumah tangga dan perlengkapan dimana komponen kegiatan ini untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PKTL sesuai

kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal dengan capaian kinerja 1 layanan.

7. Layanan perkantoran

Layanan perkantoran yang terdiri dari pembayaran gaji dan tunjangan , operasional dan pemeliharaan kantor tercapai sesuai target yaitu 1 layanan. Terlaksananya RO ini juga mendukung tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PKTL sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal.

8. Layanan sarana internal

Layanan sarana internal capaian kinerja yang ditetapkan yaitu 6 Unit. Komponen kegiatan ini mencakup pengadaan peralatan perangkat pengolahan data dan komunikasi berupa printer sebanyak 3 unit dan pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran berupa AC, meja dan kursi sebanyak 3 unit. Capaian RO mendukung tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PKTL sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal.

B. Capaian Anggaran

B.1. Capaian Anggaran Tahun 2021

Untuk mendukung pencapaian kinerja kegiatan tahun 2021, BPKH Wilayah XII memperoleh anggaran yang bersumber dari DIPA BA-29 sebesar Rp. 7.138.502.000,-. Namun demikian pada tahun 2022 terdapat perubahan terhadap pagu anggaran sebagai berikut :

- 1) Alokasi pagu awal Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebesar Rp. 7.138.502.000,-
- 2) Pada bulan April 2021 terdapat alokasi ABT penggunaan sebagian dana PNBPKH Tahun 2021 lingkup Ditjen DPKTL. BPKH Wilayah XII mendapat tambahan sebesar Rp. Rp. 1.842.387.000,-
- 3) Pada bulan Juli 2021 dilakukan refocusing anggaran sebesar Rp. 582.703.000,- sehingga DIPA BPKH Wilayah XII menjadi Rp. 8.057.129.000,-

Realisasi penggunaan anggaran sampai dengan bulan Desember 2021 adalah Rp. 8.047.063.253,- atau 99,88% dari pagu Rp. 8.057.129.000,-. Rincian realisasi masing-masing kegiatan dan RO dapat dilihat pada Tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4. Realisasi Anggaran BPKHTL Wilayah XII Tahun 2021

No.	Kegiatan/ Rincian Output	Indikator Kinerja	Volume	Anggaran BPKH Tahun 2021		
				Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> - Panjang batas kawasan hutan yang telah diselesaikan hak-hak pihak ketiga - Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKH 	3 Rekomendasi Kebijakan	3.076.247.000,00	3.075.929.437,00	99,99
	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan	Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan penataan batas kawasan hutan yang diterbitkan	1 Rekomendasi Kebijakan	1.186.025.000,00	1.185.822.600,00	99,98
	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan (PEN)	Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan penataan batas kawasan hutan yang diterbitkan (PEN)	1 Rekomendasi Kebijakan	390.222.000,00	390.117.575,00	99,97
	Inventarisasi, verifikasi dan BATB objek TORA dalam kawasan hutan (PEN)	Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan inventarisasi, verifikasi dan penataan batas objek TORA dalam kawasan hutan (PEN)	1 Rekomendasi Kebijakan	1.500.000.000,00	1.499.989.262,00	99,99
2.	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	<ul style="list-style-type: none"> - Data dan informasi Sumber Daya Hutan hasil inventarisasi Hutan Nasional di wilayah kerja BPKH - Data dan informasi pemantauan SDH di wilayah kerja BPKH 	5 Layanan	304.473.000,00	303.523.578,00	99,69
	Data dan informasi SDH di wilayah kerja BPKH	Penyediaan data dan informasi sumber daya hutan dan kawasan hutan terlayani dan diperbarui	4 Layanan	272.562.000,00	271.727.578,00	99,69
	Data dan informasi pemantauan SDH di wilayah kerja BPKH	Penyediaan data dan informasi pemantauan SDH di wilayah kerja BPKH	1 Layanan	31.911.000,00	31.796.000,00	99,64
3.	Perencanaan Kawasan Hutan	Hasil verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah kerja BPKH	1 Badan Usaha	73.531.000,00	73.342.000,00	99,74
	Hasil verifikasi PNPB penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	Pelaksanaan verifikasi PNPB penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKH terlaksana	1 Badan Usaha	73.531.000,00	73.342.000,00	99,74

No.	Kegiatan/ Rincian Output	Indikator Kinerja	Volume	Anggaran BPKH Tahun 2021		
				Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
4.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	- Nilai SAKIP Ditjen PKTL - Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL - Laporan Keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel		4.602.878.000,00	4.594.268.238,00	99,81
	Layanan perkantoran	Layanan perkantoran terlaksana	1 Layanan	4.120.831.000,00	4.112.702.008,00	99,80
	Layanan dukungan manajemen Satker	Layanan dukungan manajemen satker terlaksana	1 Layanan	408.047.000,00	407.764.230,00	99,93
	Layanan sarana internal	Layanan sarana internal terlaksana	10 Unit	74.000.000,00	73.802.000,00	99,73
Jumlah Total Anggaran				8.057.129.000,00	8.047.063.253,00	99,88

B.2. Capaian Anggaran Tahun 2022

DIPA BPKHTL Wilayah XII Tahun Anggaran 2022 mengalami beberapa kali perubahan dikarenakan penambahan program dan kegiatan, penambahan pagu anggaran PNBPKH, realokasi anggaran blokir *Automatic Adjustment* dan pergeseran anggaran belanja yang bersumber dana dari Rupiah Murni maupun PNBPKH sehingga DIPA terakhir BPKHTL Wilayah XII adalah sebesar Rp. 9.319.720.000,-

1. Pagu awal	Sesuai dengan pengesahan DIPA T.A 2022 Nomor : 029.06.2-439649/2022 tanggal 17 November 2021, anggaran BPKHTL Wilayah XII sebesar Rp. 5.746.709.000,-
2. Penambahan pagu anggaran	Revisi dilakukan pada bulan Februari 2022 dalam rangka penambahan pagu anggaran DIPA dengan sumber dana Rupiah Murni dan PNBPKH. Penambahan anggaran dikarenakan BPKHTL Wilayah XII mendapatkan mandat untuk melaksanakan Program Ditjen PKTL yaitu program kualitas lingkungan hidup dengan kegiatan pencegahan dampak lingkungan sebesar Rp. 35.690.000,-
3. Penambahan pagu anggaran PNBPKH	Revisi dilakukan pada bulan Juni 2022 dalam rangka penambahan pagu anggaran DIPA yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan [PNBPKH] untuk kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional : penguatan dan penatagunaan kawasan hutan; rencana dan penggunaan kawasan

		hutan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan. BPKHTL Wilayah XII mendapat alokasi belanja tambahan sebesar Rp. 3.605.001.000,-
4.	Penambahan pagu anggaran dari penyesuaian Belanja Pegawai	Revisi dilakukan pada bulan Oktober 2022 dalam rangka penambahan pagu anggaran DIPA dengan sumber dana Rupiah Murni pada Belanja Pegawai yang berasal dari anggaran blokir <i>Automatic Adjustment</i> (AA) pada Belanja Pegawai DIPA Ditjen PKTL T.A 2022. Penambahan Belanja Pegawai pada DIPA BPKHTL Wilayah XII sebesar Rp. 304.000.000,-
5.	Realokasi anggaran Blokir <i>Automatic Adjustment</i> T.A 2022	Revisi dilakukan pada bulan Oktober 2022 dalam rangka realokasi Belanja Pegawai dengan sumber dana Rupiah Murni. Realokasi dilakukan untuk mengantisipasi kebutuhan prioritas mendesak pada akhir tahun. Realokasi Belanja Pegawai berasal dari anggaran blokir <i>Automatic Adjustment</i> pada Belanja Pegawai DIPA Ditjen PKTL T.A 2022. BPKHTL Wilayah XII mendapat alokasi realokasi AA/pengurangan DIPA Rp. 333.680.000,-
6.	Penambahan pagu anggaran dari Belanja Pegawai Ditjen PKTL	Revisi dilakukan pada bulan November 2022 dalam rangka penambahan pagu anggaran DIPA dengan sumber dana Ruiah Murni dari kelebihan anggaran Belanja Pegawai lingkup Ditjen PKTL. Revisi anggaran dilakukan untuk pemenuhan belanja operasional mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan prioritas nasional. BPKHTL Wilayah XII mendapat penambahan anggaran sebesar Rp. 231.000.000,-
7.	Pergeseran pagu anggaran dari Belanja Pegawai ke Belanja Operasional	Revisi dilakukan pada bulan November 2022 dalam rangka optimalisasi kelebihan Belanja Pegawai BPKHTL Wilayah XII. Pergeseran anggaran Belanja Pegawai yang bersumber dari Rupiah Murni menjadi Belanja Operasional untuk pemeliharaan peralatan dan mesin dan belanja keperluan kantor sebesar Rp. 120.000.000,-
8.	Realokasi anggaran Blokir <i>Automatic Adjustment</i> T.A 2022	Revisi dilakukan pada bulan November 2022 dalam rangka realokasi anggaran blokir <i>Automatic Adjustment</i> Tahap ke-2 Lingkup Ditjen PKTL DIPA T.A 2022 pada komponen layanan dukungan manajemen satker BPKHTL belanja perjalanan dinas. Anggaran blokir <i>Automatic Adjustment</i> Tahap ke-2/pengurangan DIPA BPKHTL Wilayah XII sebesar Rp. 269.000.000,-

Realisasi keuangan sampai dengan bulan Desember 2022 adalah sebesar Rp. 9.305.408.996,00 atau 99,85% dari pagu Rp. 9.319.720.000,-. Rincian realisasi anggaran BPKHTL Wilayah XII Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Realisasi Anggaran DIPA BPKHTL Wilayah XII Tahun Anggaran 2022

No.	Kegiatan/ Rincian Output	Indikator Kinerja	Volume	Anggaran BPKH Tahun 2022		
				Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pencegahan Dampak Lingkungan	Terlaksananya Layanan Kajian Tata Lingkungan di wilayah kerja BPKHTL	2 Layanan	35.690.000,00	35.540.620,00	99,58
	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL	Terlaksananya layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL	1 Layanan	17.190.000,00	17.068.060,00	99,29
	Layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKHTL	Terlaksananya layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKHTL	1 Layanan	18.500.000,00	18.472.560,00	99,85
2	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Panjang batas kawasan hutan yang telah diselesaikan hak-hak pihak ketiga	1 Rekomendasi Kebijakan	3.605.001.000,00	3.604.950.954,00	100,00
	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan	Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan penataan batas kawasan hutan yang diterbitkan	1 Rekomendasi Kebijakan	3.605.001.000,00	3.604.950.954,00	100,00
2.	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	1. Data dan informasi Sumber Daya Hutan hasil inventarisasi Hutan Nasional di wilayah kerja BPKH 2. Data dan informasi pemantauan SDH di wilayah kerja BPKH	6 Layanan	424.907.000,00	424.603.244,00	99,93
	Data dan informasi sumber daya hutan di wilayah kerja BPKHTL	Penyediaan data dan informasi sumber daya hutan di wilayah kerja BPKHTL terlayani	5 Layanan	335.977.000,00	335.834.187,00	99,96
	Data dan informasi pemantauan sumber daya hutan di wilayah kerja BPKHTL	Penyediaan data dan informasi pemantauan SDH di wilayah kerja BPKH	1 Layanan	88.930.000,00	88.769.057,00	99,82
3.	Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Hasil verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah kerja BPKH	1 Badan Usaha	60.000.000,00	59.821.318,00	99,70
	Hasil verifikasi PNBK penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	Pelaksanaan verifikasi PNBK penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKH terlaksana	1 Badan Usaha	60.000.000,00	59.821.318,00	99,70

No.	Kegiatan/ Rincian Output	Indikator Kinerja	Volume	Anggaran BPKH Tahun 2022		
				Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
4.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	1. Nilai SAKIP Ditjen PKTL 2. Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL 3. Laporan Keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel	2 Layanan	5.194.122.000,00	5.180.492.869,00	99,74
	Layanan umum terlaksana	Layanan perkantoran terlaksana	1 Layanan	388.600.000,00	388.401.227,00	99,95
	Layanan perkantoran	Layanan perkantoran terlaksana	1 Layanan	4.748.522.000,00	4.735.403.942,00	99,72
	Layanan sarana internal	Layanan sarana internal terlaksana	6 Unit	57.000.000,00	56.687.700,00	99,45
Jumlah Total Anggaran				9.319.720.000,00	9.305.408.996,00	99,85

BAB III

RENCANA KERJA TAHUN 2023

A. Strategi Mendukung Program KLHK dan Program Prioritas Nasional

Kegiatan yang terdapat dalam Renja BPKHTL Wilayah XII Tahun 2023 merupakan bagian dari program Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan untuk mendukung program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mewujudkan program Prioritas Nasional (PN) RKP tahun 2023. Arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2023 dituangkan dalam 7 (tujuh) PN RKP Tahun 2023 dimana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendukung pada 4 (empat) Prioritas Nasional yaitu : (1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing; dan (4) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Keempat program Prioritas Nasional yang didukung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diterjemahkan dalam proyek Kementerian/Lembaga. Sejalan dengan hal tersebut Ditjen PKTL turut mendukung keempat Program Prioritas melalui program antara lain : (1) kualitas lingkungan hidup; (2) pengelolaan hutan berkelanjutan; dan (3) dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Sasaran strategis Ditjen PKTL terhadap 3 program diatas adalah : (1) meningkatnya kualitas lingkungan hidup; (2) terselesaikannya status kawasan hutan yang diakui secara legal dan legitimate; (3) meningkatnya kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat pada kawasan hutan; (4) menurunnya laju penyusutan hutan; (5) meningkatnya penerimaan negara dari lingkungan hidup dan kehutanan; dan (6) meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien.

Peran BPKHTL Wilayah XII dalam mendukung 6 (enam) sasaran strategis program Ditjen PKTL dilakukan melalui 5 (lima) kegiatan yaitu : (1) pencegahan dampak lingkungan; (2) pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan; (3) inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, (4) rencana dan

penggunaan kawasan hutan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan; dan (5) dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya lingkup Ditjen PKTL. Strategi yang ditempuh BPKHTL Wilayah XII dalam mendukung program KLHK dan Ditjen PKTL adalah :

1. Menetapkan kegiatan, Rincian Output dan komponennya tahun 2023 yang mendukung program KLHK dan Ditjen PKTL
2. Menyusun revisi Rencana Kerja sesuai dengan ketersediaan anggaran, SDM dan sarana prasarana yang dimiliki
3. Meningkatkan koordinasi dengan para pihak dalam penyelesaian penataan batas kawasan hutan di Provinsi Kepulauan Riau

B. Sasaran Kegiatan Tahun 2023

Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada tahun 2023 telah menetapkan 6 (enam) sasaran program strategis. Dari 6 (enam) sasaran tersebut terdapat 4 (empat) sasaran kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BPKHTL Wilayah XII dalam mendukung tercapainya sasaran program strategis Ditjen PKTL. Sasaran kegiatan yang diharapkan oleh BPKHTL Wilayah XII terhadap 4 (empat) kegiatan yang telah ditetapkan pada Renja Tahun 2023 adalah : (1) meningkatnya penguatan Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dalam upaya pengamanan lingkungan hidup; (2) terselesaikannya penetapan seluruh kawasan hutan; (3) meningkatnya pelayanan data dan informasi sumber daya hutan; dan (4) meningkatnya tata kelola pemerintahan di lingkungan Ditjen PKTL sesuai kerangka reformasi Birokrasi. Dengan didukung anggaran yang ditetapkan dan SDM yang dimiliki BPKHTL Wilayah XII optimis dapat menyelesaikan target kinerja tahun 2023. Target kinerja dengan rincian kegiatan, sasaran kegiatan dan indikator kinerja serta target yang akan dilaksanakan BPKHTL Wilayah XII tahun 2023 sebagaimana pada Tabel 6.

Tabel 6. Target Kinerja BPKHTL Wilayah XII Tahun 2023

Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Rincian Output	Indikator Kinerja	Volume
K.1 Pencegahan Dampak Lingkungan SK.1 Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan	Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Terlaksananya penyusunan dan penetapan RPPLH Nasional	1 Rekomendasi Kebijakan

Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Rincian Output	Indikator Kinerja	Volume
K.2 SK.2	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Terselesaikanya seluruh kawasan hutan		
	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan	Terlaksananya penataan batas kawasan hutan dalam rangka penetapan kawasan hutan	1 Rekomendasi Kebijakan
K.3 SK.3	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Meningkatnya pelayanan data dan informasi sumber daya hutan		
	Data dan informasi sumber daya hutan di wilayah kerja BPKHTL	Terlaksananya layanan data dan informasi sumber daya hutan di wilayah kerja BPKHTL	1 Layanan
	Data dan informasi penutupan lahan nasional di wilayah kerja BPKHTL	Terlaksananya layanan data dan informasi penutupan lahan nasional di wilayah kerja BPKHTL	1 Layanan
K.4 SK.4	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PKTL Meningkatnya tata kelola pemerintahan lingkup Ditjen PKTL sesuai kerangka Reformasi Birokrasi		
	Layanan Umum	Layanan umum terlaksana	1 Layanan
	Layanan Perkantoran	Layanan perkantoran terlaksana	1 Layanan

Rencana Kerja dan penganggaran yang akan dilaksanakan BPKHTL Wilayah XII tahun 2023 secara rinci tertuang dalam matriks terlampir. Penjabaran dari masing-masing indikator kinerja dari Rencana Kerja BPKHTL Wilayah XII Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Terlaksananya penyusunan dan penetapan RPPLH Nasional sebanyak 1 Rekomendasi Kebijakan. Komponen kegiatan yang dilaksanakan yaitu pengembangan NSPK penyusunan dan penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) di Provinsi Kepulauan Riau
2. Terlaksananya penataan batas kawasan hutan dalam rangka penetapan kawasan hutan
 - Komponen kegiatan yang dilaksanakan yaitu penataan batas kawasan hutan yang terdiri dari (1) pembuatan trayek batas 6 kabupaten; (2) pemancangan batas sementara dan identifikasi hak-hak pihak ketiga kawasan hutan di Kota Tanjungpinang; (3) pemancangan batas sementara dan identifikasi hak-hak pihak ketiga kawasan hutan di Kabupaten Bintan; (4) pemancangan batas sementara dan identifikasi hak-hak pihak ketiga kawasan hutan di Kabupaten Karimun; (5) pemancangan batas sementara dan identifikasi hak-

hak pihak ketiga kawasan hutan di Kabupaten Kepulauan Anambas; (6) pemancangan batas sementara dan identifikasi hak-hak pihak ketiga kawasan hutan di Kabupaten Natuna; (7) pemancangan batas sementara dan identifikasi hak-hak pihak ketiga kawasan hutan di Kabupaten Lingga; (8) pengukuran dan pemasangan tanda batas definitif kawasan hutan Kota Tanjungpinang; (9) pengukuran dan pemasangan tanda batas definitif kawasan hutan Kabupaten Bintan; (10) pengukuran dan pemasangan tanda batas definitif kawasan hutan di Kabupaten Karimun; (11) pengukuran dan pemasangan tanda batas definitif kawasan hutan di Kabupaten Lingga; (12) pengukuran dan pemasangan tanda batas definitif kawasan hutan di Kabupaten Kepulauan Anambas; (13) pengukuran dan pemasangan tanda batas definitif kawasan hutan di Kabupaten Natuna; dan (14) supervisi/bimbingan pengawasan pengukuran dan pemasangan tanda batas definitif

3. Terlaksananya layanan data dan informasi sumber daya hutan di wilayah kerja BPKHTL
 - Komponen kegiatan yang dilaksanakan yaitu inventarisasi hutan nasional melalui enumerasi TSP/PSP sebanyak 1 Klaster di Kabupaten Natuna
4. Terlaksananya layanan data dan informasi penutupan lahan nasional di wilayah kerja BPKHTL
 - Komponen kegiatan yang dilaksanakan yaitu pengecekan lapangan hasil penafsiran citra satelit resolusi sedang untuk update data penutupan lahan nasional sebanyak 1 Lokasi di Kabupaten Natuna
5. Layanan umum terlaksana
 - Komponen kegiatan yang dilaksanakan layanan dukungan manajemen satker seperti penyusunan rencana program dan rencana anggaran; pelaksanaan pemantauan dan evaluasi; pengelolaan keuangan dan perbendaharaan; pengelolaan kepegawaian; pelayanan umum rumah tangga dan perlengkapan dan pembangunan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015.
6. Layanan perkantoran terlaksana
 - Komponen kegiatan yang dilaksanakan yaitu pembayaran gaji dan tunjangan dan operasional dan pemeliharaan kantor.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XII Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan kegiatan di tahun 2023. Dengan didukung anggaran yang ditetapkan dan SDM yang dimiliki BPKHTL Wilayah XII optimis dapat menyelesaikan target kinerja tahun 2023. Rencana Kerja ini diharapkan dapat tercapai sehingga target kinerja pada akhir tahun periode Rencana Strategis terpenuhi sehingga mampu mendukung dalam terwujudnya Program Prioritas Nasional khususnya pada bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan.

LAMPIRAN

**MATRIK RENCANA KERJA (RENJA)
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH XII TAHUN 2023**

Program	Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Rincian Output/ Komponen	Indikator Kinerja	Volume	Anggaran (Rp)
Kualitas Lingkungan Hidup	K.1 Pencegahan Dampak Lingkungan SK.1 Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan				369.000.000,00
		Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Terlaksananya penyusunan dan penetapan RPPLH Nasional	1 Rekomendasi Kebijakan	369.000.000,00
		Pengembangan NSPK Penyusunan dan Penetapan RPPLH Nasional			369.000.000,00
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	K.2 Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan SK.2 terselesaikanya seluruh kawasan hutan				19.028.307.000,00
		Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan	Terlaksananya penataan batas kawasan hutan dalam rangka penetapan kawasan hutan	1 Rekomendasi Kebijakan	19.028.307.000,00
		a. Pembuatan trayek batas			906.243.000,00
		b. pemancangan batas sementara dan identifikasi hak-hak pihak ketiga kawasan hutan di Kota Tanjungpinang			220.398.00,00
		c. pemancangan batas sementara dan identifikasi hak-hak pihak ketiga kawasan hutan di Kabupaten Bintan			1.694.997.000
		d. pemancangan batas sementara dan identifikasi hak-hak pihak ketiga kawasan hutan di Kabupaten Karimun			528.832.000,00

Program	Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Rincian Output/ Komponen	Indikator Kinerja	Volume	Anggaran (Rp)
		e. pemancangan batas sementara dan identifikasi hak-hak pihak ketiga kawasan hutan di Kabupaten Kepulauan Anambas			854.286.000,00
		f. pemancangan batas sementara dan identifikasi hak-hak pihak ketiga kawasan hutan di Kabupaten Lingga			1.145.458.000,00
		g. pemancangan batas sementara dan identifikasi hak-hak pihak ketiga kawasan hutan di Kabupaten Natuna			2.940.781.000,00
		h. pengukuran dan pemasangan tanda batas definitif kawasan hutan di Kabupaten Kepulauan Anambas			1.151.290.000,00
		i. pengukuran dan pemasangan tanda batas definitif kawasan hutan di Kabupaten Natuna			4.092.646.000,00
		j. pengukuran dan pemasangan tanda batas definitif kawasan hutan di Kabupaten Lingga			1.641.288.000,00
		k. pengukuran dan pemasangan tanda batas definitif kawasan hutan di Kota Tanjungpinang			307.854.000,00
		l. pengukuran dan pemasangan tanda batas definitif kawasan hutan di Kabupaten Bintan			2.515.036.000,00
		m. pengukuran dan pemasangan tanda batas definitif kawasan hutan di Kabupaten Karimun			740.532.000,00
		n. bimbingan pengawasan pengukuran dan pemasangan tanda batas definitif			288.675.000,00

Program	Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Rincian Output/ Komponen	Indikator Kinerja	Volume	Anggaran (Rp)
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	K.3 SK.3	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Meningkatnya pelayanan data dan informasi sumber daya hutan			172.903.000,00
		Data dan informasi sumber daya hutan di wilayah kerja BPKHTL	Terlaksananya layanan data dan informasi sumber daya hutan di wilayah kerja BPKHTL	1 Layanan	75.605.000,00
		Inventarisasi Hutan Nasional (Enumerasi TSP/PSP)			75.605.000,00
		Data dan informasi penutupan lahan nasional di wilayah kerja BPKHTL	Terlaksananya layanan data dan informasi penutupan lahan nasional di wilayah kerja BPKHTL	1 Layanan	97.298.000,00
		Penafsiran citra satelit resolusi sedang untuk update data penutupan lahan tingkat nasional			97.298.000
Dukungan Manajemen	K.4 SK.4	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PKTL Meningkatnya tata kelola pemerintahan lingkup Ditjen PKTL sesuai kerangka Reformasi Birokrasi			6.891.408.000,00
		Layanan Umum	Layanan terlaksana umum	1 Layanan	575.000.000,00
		a. penyusunan program dan penyusunan rencana anggaran			155.005.000,00
		b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi			11.487.000,00
		c. pengelolaan keuangan dan perbendaharaan			63.395.000,00
		d. pengelolaan kepegawaian			76.083.000,00
		e. pelayanan umum rumah tangga dan perlengkapan			90.500.000,00
		f. pembangunan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015			119.730.000,00

Program	Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Rincian Output/ Komponen	Indikator Kinerja	Volume	Anggaran (Rp)
		g. penanganan dan pencegahan COVID-19			58.800.000,00
		Layanan Perkantoran	Layanan perkantoran terlaksana	1 Layanan	6.406.408.000,00
		a. Gaji dan tunjangan			5.079.508.000,00
		b. Operasional dan pemeliharaan kantor			1.326.900.000,00



Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XII
Jl. Ganet KM.14 Tanjungpinang
Telepon: 0771-7335242 WA: 082289997767